

Pemberdayaan Masyarakat : Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) sebagai Motor Penggerak Pariwisata di Daerah Tujuan Wisata (DTW) Guci Kabupaten Tegal

Triana Mukti Trisnoasih
[triana_mukti@ymail.com](mailto: triana_mukti@ymail.com)

Turtiantoro
[turtiantoro@yahoo.com](mailto: turtiantoro@yahoo.com)

Departemen Politik dan Pemerintahan Fisip Undip Semarang

ABSTRAK

Kelompok Sadar Wisata memiliki fungsi sebagai motor penggerak pariwisata, sehingga diperlukan adanya pemberdayaan untuk meningkatkan kekuatan atau daya dari masyarakat. Pokdarwis Guci belum menjalankan peran sebagai mana mestinya. Maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemberdayaan masyarakat dalam sektor pariwisata, peran Pokdarwis selama ini, dan menganalisa faktor-faktor hambatan dan peluang pemberdayaan masyarakat dan pergerakan Pokdarwis Guci. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam dan dokumen. Kemudian dianalisis dengan menggunakan triangulasi sumber data.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa pemberdayaan dilakukan oleh berbagai pihak. Untuk kepariwisataan terutama dalam penguatan sumber daya manusia, penguatan kelembagaan, dari pemerintah melakukan networking dan pembinaan pedagang serta dukungan lainnya. Pokdarwis mengalami kompleksitas dalam keberadaanya, modal sosial yang tidak kuat menjadi faktor utama sehingga perjalanan Pokdarwis saat ini mati suri tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hambatan pemberdayaan dan pergerakan Pokdarwis yaitu kelembagaan Pokdarwis lemah, ketertinggalan masyarakat Guci, partisipasi masyarakat kurang, orientasi paradigma lama pemberdayaan, perhatian dari pemerintah desa belum maksimal, dan penyuluhan kepada masyarakat masih kurang. Serta terdapat peluang yaitu sisi optimisme untuk Pokdarwis, pengembangan DTW Guci, rencana pengembangan Desa Guci.

Kata Kunci : Pemberdayaan Masyarakat, Pokdarwis, DTW Guci

**Community Empowerment : Tourism Conscious Group as a Driving Force
for Tourism in Tourist Destinations Guci Tegal Regency**

Triana Mukti Trisnoasih
[triana_mukti@ymail.com](mailto: triana_mukti@ymail.com)

Turtiantoro
[turtiantoro@yahoo.com](mailto: turtiantoro@yahoo.com)

Political and Government Departements Fisip Undip Semarang

ABSTRACT

Tourism conscious Group have a function as a driving force for tourism, so empowerment is needed to increase the strength or power of the community. Pokdarwis Guci has not carried out the role as it should be. So this study aims to describe community empowerment in the tourism sector, to know the role of Pokdarwis so far, and to analyze the factors of obstacles and opportunities for community empowerment and the movement of Pokdarwis Guci. This study uses qualitative methods with data collection techniques in the form of observations, in-depth interviews and documents. Then analyzed using data source triangulation.

The results of the study explained that empowerment was carried out by various parties. For tourism, especially in strengthening human resources, strengthening institutions, from the government to conduct networking and guidance for traders and provide other support. Pokdarwis experienced complexity in its existence, social capital that was not strong became the main factor so that the current Pokdarwis trip to death did not work as it should. Barriers to empowerment and the Pokdarwis movement, namely weak Pokdarwis institutions, backwardness of the community of jars, lack of community participation, orientation of the old paradigm of empowerment, attention from the village government is not optimal, and education to the community is lacking. And there are opportunities namely optimism for Pokdarwis, development of DTW Guci, development plans for Guci village.

Key Words : Community Empowerment, Pokdarwis, DTW Guci

A. PENDAHULUAN

Dalam kepariwisataan ketika tempat wisata sudah menjadi sebuah destinasi wisata harus terbentuk Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Keberadaan Pokdarwis memiliki peranan penting yaitu sebagai motor penggerak pariwisata, sehingga diperlukan adanya pemberdayaan sebagai bentuk upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kekuatan atau daya (power) pihak-pihak yang tidak atau kurang berdaya. Terbentuknya Pokdarwis Guci bukan berasal dari masyarakat melainkan sengaja dibentuk oleh Pemerintah berhubungan dengan dinas terkait. Dalam Daerah Tujuan Wisata (DTW) Guci Kabupaten Tegal keberadaan Kelompok Sadar Wisata belum menjalankan peran sebagaimana mestinya yang diinginkan, diketahui bahwa masih memiliki ketergantungan sampai saat ini Guci belum ditetapkan menjadi sebuah desa wisata.

Sadar wisata hendaknya diartikan sebagai pemahaman akan arti dari hakikat pengembangan pariwisata. Mereka memiliki arti sebagai masyarakat yang mengetahui dan menyadari apa yang dikerjakan dan juga masalah-masalah yang dihadapi untuk membangun pariwisata. Apabila terdapat kesadaran ini maka akan berkembang pemahaman dan pengertian yang proposional diantara berbagai pihak, yang pada gilirannya akan mendorong mereka untuk mau berperan serta dalam pembangunan kepariwisataan.¹

Daerah Tujuan Wisata (DTW) Guci menjadi destinasi andalan dalam kunjungan wisatawan, dengan jumlah total wisatawan tertinggi, dan menyumbangkan retribusi tertinggi kepada Kabupaten Tegal dari sektor pariwisata sepanjang tahun 2015 mencapai Rp. 3.626 miliar. Program pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan merupakan langkah penting yang perlu dilaksanakan secara terarah dan berkesinambungan untuk menyiapkan masyarakat agar semakin memiliki kapasitas dan kemandirian serta berperan aktif dalam mendukung keberhasilan pembangunan kepariwisataan.

¹ Gamal Suwanto, *Dasar-Dasar Pariwisata*, (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2004) hlm 29.

Prinsip dari penyelenggaraan tata kelola kepariwisataan yang baik pada intinya adalah adanya koordinasi dan sinkronisasi program antar pemangku kepentingan yang ada serta melibatkan partisipais aktif yang sinergis (terpadu dan saling menguatkan) antara pihak pemerintah, swasta/ industry pariwisata, dan masyarakat setempat yang terkait.² Masyarakat merupakan salah satu unsur penting dalam pariwisata, masyarakat bertindak sebagai tuan rumah untuk memberikan pelayanan yang baik kepada wisatawan dan masyarakat ikut serta salah satu pemangku kepentingan unutm bersama-sama dengan pihak lainnya bekerjasama atau bersinergi melaksanakan dan mendukung pembangunan kepariwisataan.

Peran dan kontribusi penting dari Pokdarwis harus terus didukung dan dibina sehingga dapat berperan lebih efektif keterlibatannya dalam menggerakkan partisipasi masyarakat untuk mewujudkan lingkungan dan suasana yang terkendali dalam perkembangan disekitar destinasi wisata tersebut. Oleh karena itu, maka tulisan ini akan membahas beberapa point : Pertama, pemberdayaan masyarakat dalam sektor pariwisata di DTW Guci. Kedua, peran Kelompok Sadar Wisata Guci sebagai motor penggerak pariwisata di DTW Guci. Ketiga, hambatan dan peluang dalam pemberdayaan dan pergerakan Kelompok Sadar wisata di DTW Guci. Keempat, penutup berupa simpulan dan saran.

B. LANDASAN TEORI

B.1 Teori Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. konsep ini mencerminkan paradigm baru pembangunan, yakni yang bersifat “*people-centered, participatory, empowering and sustainable*” (Chambers, 1995). Definisi pemberdayaan menurut Wrihatno & Nugroho, mencakup pengertian *community development* (pembangunan masyarakat) dan *community-based development* (pembangunan yang bertumpu pada masyarakat), dan tahap selanjutnya muncul istilah *community-driven*

² Janianton Damanik dan Frans Teguh, Manajemen Destinasi Pariwisata, (Yogyakarta: Kepel Press, 2013)

development yang diterjemahkan sebagai pembangunan yang diarahkan atau diistilahkan pembangunan yang digerakkan masyarakat.³ Tujuan akhir dari pemberdayaan masyarakat adalah memandirikan masyarakat, memampukan dan membangun kemampuan untuk memajukan diri kearah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan. Proses pembagian peran dalam pemberdayaan masyarakat dari awal proses hingga berjalannya waktu seharusnya inisiatif fasilitator semakin berkurang, dan inisiatif masyarakat semakin banyak.

Kompleksitas dalam pemberdayaan yang akan dilewati adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Untuk itu dalam suatu pemberdayaan harus diperhatikan oleh semua pihak yang menjalankan program pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan konsep pemberdayaan yaitu modal sosial, partisipasi dan masyarakat. Selain itu program pemberdayaan masyarakat diharapkan selain menghasilkan sumberdaya manusia mandiri dan berkualitas juga mempunyai tanggung jawab serta kepedulian untuk menjadi keharmonisan hubungan dengan lingkungannya. Reorientasi paradigma pemberdayaan mengalami kendala dalam pemberdayaan dengan pendekatan *top-down* oleh karenanya masyarakat berfikiran harus menyesuaikan dengan program pemberdayaan dari pemerintah yang seharusnya adalah program pemberdayaan tersebut yang menyesuaikan dengan keadaan masyarakat.

B.2 Kebijakan Pariwisata

Goeldner & Ritchie (2006) mendefinisikan kebijakan pariwisata dengan menyaran, “kebijakan pariwisata dapat didefinisikan sebagai seperangkat peraturan, pedoman, dan tujuan pengembangan/promosi dan strategi yang menyediakan kerangka kerja dimana keputusan kolektif secara langsung mempengaruhi pengembangan pariwisata dan kegiatan sehari-hari dalam tujuan yang diambil. Tujuan akhir dari kebijakan pariwisata adalah untuk memperbaiki

³ Randy R. Wrihatno dan Riant Nugroho D. Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat, (Jakarta: PT. Elex Media Kumputindo, 2007) hlm 74.

kemajuan bangsa (wilayah atau lokalitas) dan kehidupan warganya.⁴ Pembangunan kepariwisataan melibatkan peran dari seluruh pemangku kepentingan yang terdiri dari 3 (tiga) pihak yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat, dengan segenap peran dan tujuannya masing-masing.

Pembuatan kebijakan pariwisata sebagai kegiatan politik utama dan paling utama dipengaruhi oleh ekonomi, karakteristik sosial dan budaya masyarakat tertentu, dan oleh struktur formal pemerintahan dan fitur lain dari sistem politik lokal. Pokdarwis berperan sebagai motivator, penggerak serta komunikator dalam upaya meningkatkan kesiapan dan kepedulian masyarakat di sekitar destinasi pariwisata atau lokasi tersebut dari daya tarik wisata sehingga dapat menjalankan peran sebagai tuan rumah yang baik bagi berkembangnya kepariwisataan yang ada di daerah tersebut, serta memiliki kesadaran akan peluang dan nilai manfaat yang dapat dikembangkan dari kegiatan pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Proses pembentukan Pokdarwis terdapat 2 (dua) pendekatan yaitu inisiatif dari masyarakat lokal dan inisiatif dari instansi terkait dibidang kepariwisataan.⁵ Dalam konsep kebijakan pariwisata salah satunya terdapat peranan penting dari masyarakat, untuk itu kehadiran dari kelompok atau organisasi pariwisata akan membantu dalam tata kehidupan kepariwisataan, keterlibatan mereka dibutuhkan dalam penentuan kebijakan pariwisata.

C. METODA PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif yang mencoba menggambarkan kondisi riil yang terjadi dilapangan serta melakukan analisis secara cermat dalam mengamati setiap fenomena yang dijumpai. Teknik pengumpulan data berupa observasi dan wawancara pada informan yaitu Bupati, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, Pemerintah Desa Rembul dan Desa Guci, Instansi terkait atau OPD Kabupaten Tegal, Pokdarwis Guci, Elemen masyarakat

⁴ Allen MD, Edgell DL, Smith G, Swanson J, *Tourism Policy and planning*, (Amsterdam: 1stedn. Butterworth-Heinemann, 2007) hlm 7.

⁵ Buku Pedoman Kelompok Sadar Wisata, Oleh: Direktur Jendral Pengembangan Destinasi Pariwisata Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Jakarta, Januari 2012)

dan unsur lainnya, diantaranya UPTD/ kalangan swasta, serta telaah dokumen yang digunakan untuk menambah data dari arsip, dan dokumen yang mendukung lainnya kemudian dilakukan analisis triangulasi dari sumber data yang diperoleh

D. HASIL PENELITIAN

D.1 Stakeholders dan Ragam Pemberdayaan

Keterkaitan dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam pembangunan kepariwisataan, seperti yang terjadi di Daerah Tujuan Wisata (DTW) Guci. Dalam pengelolaan pariwisata melibatkan ketika elemen yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Pemerintah daerah Kabupaten Tegal melalui Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dibantu oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Guci sebagai pengelola DTW Guci, selain itu terdapat andil dari instansi/OPD lain yang terlibat dalam pemberdayaan dilingkungan wisata Guci, dengan berbagai ragam pemberdayaan yang diberikan antara lain: Bupati selaku kepala daerah; Bappeda berkaitan penganggaran dan penguatan kelembagaan; Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan memberikan pemberdayaan melalui pematihan kemasan dan membentuk KUB (Kelompok Usaha Bersama); Dinas lingkungan Hidup kaitannya dengan Sapta Pesona tentang kebersihan; Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM memberikan penyuluhan kepada pedagang. Terdapat keterlibatan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu Pembina tidak langsung dari Kelompok Sadar Wisata.

Kalangan swasta dengan sumber daya yang dimiliki, modal dan jejaring, mereka menjalankan peran dan fungsinya sebagai pengembang dan atau pelaksana pembangunan kegiatan kepariwisataan. Swasata yang terlibat di DTW Guci baik atas nama perusahaan maupun perseorangan, pelaksanaannya dengan memberdayakan masyarakat disekitar untuk bekerja dalam perusahaan atau industri pariwisata tersebut. Beragam elemen masyarakat yang terlibat dalam pengembangan wisata Guci, antara lain pokdarwis, komunitas di sekitar dan Kelompok Usaha Bersama.

D.2 Pemberdayaan Masyarakat di DTW Guci

Pemberdayaan masyarakat dalam sektor pariwisata berupa penguatan sumber daya manusia pariwisata yang dilakukan melalui bimbingan teknis dan *workshop*. Penguatan kelembagaan juga di upayakan oleh pemerintah baik untuk Pokdariwis maupun pariwisata keseluruhan di Kabupaten Tegal. Antar pemerintah terbangun *networking* atau jalinan kerjasama dalam pemberdayaan untuk mengadakan bimbingan maupun pengembangan masyarakat. Pihak pengelola secara preventif melakukan pembinaan kepada pedagang di sekitar DTW Guci. pemberdayaan masyarakat oleh Disperinaker dengan pemberdayaan melalui KUB yang anggotanya terdiri dari beberapa pedagang atau pengusaha kecil di wilayah Bojong dan Bumijawa. Dukungan dari pemerintah terus diberikan dalam pemberdayaan masyarakat DTW Guci melalui pemantauan yang terus dilakukan secara berkelanjutan.

D.3 Peran Kelompok Sadar Wisata

Peranan Pokdarwis Guci sebagai motor penggerak pariwisata dalam lingkungan DTW Guci tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sejarah awal mula terbentuk melalui pendekatan dari instansi terkait dibidang pariwisata. Susunan dari Pokdarwis beranggotakan masyarakat dari kedua wilayah DTW Guci yaitu ada yang berasal dari Desa Rembul dan Desa Guci, Pada saat awal terbentuk Pokdarwis pernah melakukan kegiatan diantaranya, mengumpulkan pedagang untuk menyiapkan kunjungan wisatawan, kegiatan sosial, dan studi banding.

Pokdarwis Guci mengalami kompleksitas dalam keberadaannya yang menunjukkan modal sosial yang ada dimasyarakat tidak kuat, dengan kata lain adanya pro kontra, diantaranya : skeptisme terhadap Pokdarwis muncul keraguan didalamnya, dan memandang sebelah mata, kemudian adanya dualism kelompok sejenis, karena Pokdariws tidak menunjukkan adanya perubahan yang signifikan kemudian dalam masyarakat muncul kelompok lain yang sama dengan nama yang berbeda yaitu Pamdetta. Perjalanan Pokdarwis saat ini tidak ada kemajuan dari segi masukan maupun kinerja. Setelah vakumnya Pokdarwis, apabila terdapat

pembinaan yang seharusnya melibatkan Pokdarwis maka diwakilkan oleh karang taruna atau komunitas yang ada disekitar DTW Guci. Pemantauan Pokdarwis terus dilakukan untuk mensiasati ketidakaktifan Pokdarwis Guci dengan terus memberikan dukungan kepada masyarakat maupun pemuda-pemuda di lingkungan DTW Guci.

D.5 Hambatan dan Peluang Pemberdayaan dan Pergerakan Pokdarwis

Terdapat hambatan dan peluang dalam pemberdayaan dan pergerakan Pokdarwis di DTW Guci. Hambatan yang dihadapi adalah kelembagaan Pokdarwis masih lemah sehingga memunculkan skeptisme terhadap Pokdarwis, ketertinggalan masyarakat Guci, pengembangan Guci yang mayoritas berada di lingkungan dikawasan Dukuh Pekandangan Desa Rembul, partisipasi masyarakat yang kurang karena penggiat pariwisata dari masyarakat sudah berkurang, orientasi paradigma lama pemberdayaan yang memperlihatkan adanya orientasi yang memandang bentuk fisik tanpa melihat esensi sebenarnya dari pemberdayaan tersebut, perhatian dari pemerintah desa belum maksimal terlebih untuk masyarakat desa dukungan dari pemerintah desa menjadi berpengaruh, penyuluhan kepada masyarakat masih kurang terkait dengan pembinaan untuk penyedia penginapan untuk meminimalisir persaingan tidak sehat.

Disamping hambatan yang ditemui maka terdapat peluang didalamnya, yaitu terdapat sisi optimisme untuk Pokdarwis apabila Pokdarwis kembali dihidupkan peluang yang ada untuk pergerakan Pokdarwis tersebut dan adanya dukungan dari pemerintah untuk mengembangkan pariwisata berbasis masyarakat, pengembangan DTW Guci karena peluang dalam pengembangan DTW Guci kedepannya cukup besar dari segi wisata yang ada disekitar destinasi wisata Guci, dan adanya rencana pengembangan Desa Guci untuk mengembangkan pariwisata desa dengan potensi yang dimiliki.

E. PENUTUP

E.1 Simpulan

Adanya dukungan dari pemerintah untuk mengembangkan kepariwisataan di Kabupaten Tegal dan terkhusus untuk DTW Guci. Perubahan Pokdarwis di sekitar DTW Guci cenderung menunjukkan perubahan perilaku menurun karena awalan terbentuk. Dinamika yang terjadi memperlihatkan inisiatif fasilitator banyak akan tetapi inisiatif masyarakat sedikit. Keterlibatannya sebagai motor penggerak masih jauh dari harapan, sehingga saat ini motor penggerak masih di pegang oleh pemerintah daerah. Dilema yang terjadi dengan munculnya faktor penghambat dan peluang dari pemberdayaan masyarakat dan pergerakan dari Pokdarwis.

E.2 Saran

Dilakukannya kerjasama antar desa dengan pengelola, letak DTW Guci berada di dua wilayah, untuk merencanakan dan mengkomunikasikan kerjasama dalam pengelolaan maupun pengembangan wisata salah satunya dengan membentuk BUMDes, dan pemerintah desa diharapkan mampu membantu memaksimalkan potensi yang dimiliki. Penguatan kelembagaan dengan adanya pengarahan kepada Pokdarwis. Koordinasi kan kerjasama antar stakeholders diharapkan terlibat terutama untuk penentuan kebijakan sehingga menambah pandangan dalam pengembangan kedepannya. Terutama untuk komitmen dari masyarakat untuk terus menjalankan apa yang telah didapatkan dalam pemberdayaan.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Suwantoro, Gamal. 2004. Dasar-Dasar Pariwisata. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Janianton dan Frans Teguh. 2013. Manajemen Destinasi Pariwisata. Yogyakarta: Kepel Press
- Wrihatnolo, Randy R dan Riant Nugroho D. 2007. Manajemen Pemberdayaan: Sebuah pengantar dan Pedoman untuk Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Allen MD, Edgell DL, Smith G, Swanson J, 2007, Tourism Policy and Planning, Amsterdam: 1st edn. Butterworth-Heinemann
- Buku Pedoman Kelompok Sadar Wisata. 2012. Oleh : Direktur Jendral Pengembangan Destinasi Pariwisata Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.